

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses penerapan program yang dibuat oleh pejabat pemerintah dengan sasaran dari kebijakannya adalah masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana petugas pemilihan di Kabupaten Bireuen melaksanakan aksesibilitas mulai dari pendataan awal, pemutakhiran data, pendampinga, serta informasi untuk pemilih penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bireuen mendapati urutan ketiga tertinggi untuk penyandang disabilitas dari seluruh Aceh, fenomena lainnya adalah pada pemilu 2024 ditemukannya kesalahan pencatatan disabilitas dekasa sebagai pemilih biasa di Gampong Gelangang Teungeh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Berangkat dari fenomena permasalahan tersebut, kemudian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah, pertama melihat implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen pada pemutakhiran pendataan dan sosialisasi. Kedua adalah melihat hambatan dalam implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen yang dianalisis menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di kabupaten Bireuen masih belum optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agen pelaksana terhadap sasaran kebijakan dan kondisi sosial yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kendala utama. Selain itu, hambatan lainnya dalam implementasi juga ditemukan pada aspek komunikasi yang tidak efektif, struktur birokrasi yang kompleks, dan sumber daya yang kurang mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen, dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas agen pelaksana, serta sumber daya yang memadai. Rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain pelatihan bagi agen pelaksana, sosialisasi kebijakan yang lebih intensif, serta penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memadai.

Kata Kunci: *Implementasi, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.*

ABSTRACT

Policy implementation is a process of implementing a program created by government officials with the target of the policy being the community. This study aims to see how election officers in Bursan Regency carry out accessibility starting from initial data collection, updates, data, assistance, and informants for voters with disabilities. The phenomenon in this study is that Berenan Regency has the third highest ranking for people with disabilities from all over Aceh, another phenomenon is that in the 2024 election, an error was found in recording disabilities as ordinary voters in Geulangang Teungeh Village, Kota Juang District, Bireuen Regency. Departing from the phenomenon of the problem, then the focus of this research is, first, to see the complement of accessibility for people with disabilities in general elections in Bireuen Regency using the data collection and analysis update. Second, to see the obstacles in the implementation of accessibility for people with disabilities in general elections in Bucun Regency which are analyzed using the communicative language of resources, dugona, and bureaucratic mechanisms. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data is collected through interviews, observations and documentary studies. The findings of the study include that the accessibility of people with disabilities in general elections in Bireuen Regency is not optimal. The factors that affect the implementation of the policy targets and the lack of support are obstacles. Other obstacles in implementation are also found in the aspects of ineffective communication, complex governance structures and inadequate resources. The conclusion of this study is that long-term efforts are needed to improve accessibility for people with disabilities in Bireuen Regency, by strengthening coordination between institutions, improving the quality of governance and providing adequate resources, policy recommendations provided between implementing agencies, training for implementing agencies, more intensive socialization of governance, and providing reliable accessibility services.

Keywords: Implementation, Accessibility, Persons with Disabilitie